

Evaluasi efektivitas pemilihan umum dalam memperkuat sistem kepresidenan berdasarkan prinsip Pancasila

Muhamad Ali Wahyu Dwi Laksono

Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: *240401110319@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pemilu, Pancasila,
Demokrasi, Tantangan
Pemilu, Sistem
Kepresidenan

Keywords:

Elections, Pancasila,
Democracy, Election
Challenges, Presidential

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti maraknya politik uang, polarisasi politik, rendahnya partisipasi politik, serta hambatan struktural dalam penyelenggaraan yang transparan dan efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan dalam Pemilu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Pemilu dalam memperkuat sistem kepresidenan di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu. Diharapkan, implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila dapat menciptakan Pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.

ABSTRACT

General Elections are a crucial instrument in realizing democracy in Indonesia based on the values of Pancasila. Elections aim to select leaders and representatives of the people through direct, general, free, confidential, honest, and fair processes. However, the implementation of elections in Indonesia still faces various challenges, such as rampant money politics, political polarization, low political participation, and structural barriers to transparent and effective administration. This article aims to analyse the extent to which Pancasila principles are implemented in elections, identify the obstacles encountered, and formulate strategic steps to improve the effectiveness of elections in strengthening the presidential system in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach, this study emphasizes the importance of integrity, transparency, and active public participation in every stage of the election process. It is hoped that consistent implementation of Pancasila values will create high-quality elections and equitable democracy in Indonesia.

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Asmawi et al., 2024). Sebagai sarana kedaulatan rakyat, Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini mencakup pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD, serta kepala daerah, dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Handayani & Dewi, 2021). Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar moral dan etika dalam pelaksanaan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pemilu, di mana setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila (Kristian Sumual et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, Pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan seperti politik uang, rendahnya literasi politik, tingginya biaya penyelenggaraan, serta polarisasi yang memicu konflik sosial (Patricia & Yapin, 2019). Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada hasil Pemilu tetapi juga pada legitimasi pemerintahan yang terbentuk.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep segitiga terbalik sebagai kerangka berpikir. Pendekatan ini dimulai dengan menguraikan permasalahan umum terkait sistem Pemilu di Indonesia, seperti efektivitas Pemilu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Selanjutnya, fokus mengerucut pada rumusan masalah yang spesifik, di antaranya adalah efektivitas sistem Pemilu dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial, hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, sejauh mana efektivitas sistem Pemilu di Indonesia dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial? Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ketiga, langkah strategis apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem Pemilu dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses Pemilu, serta merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia, memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, serta berintegritas (Mulyadi et al., 2023; Prayogo, 2022). Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme teknis pemilihan pemimpin, tetapi juga sarana efektif dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Pembahasan

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan sarana penting dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembahasan kali ini akan menggali lebih dalam mengenai beberapa aspek penting terkait pelaksanaan Pemilu di Indonesia, termasuk efektivitas Pemilu dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial, hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara

Gambar 1. Pancasila



Sumber : freedomsiana.id

Dalam Bahasa sanskerta Pancasila berarti panca yang berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Adapun menurut istilah Pancasila berarti lima dasar, jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah lima dasar yang menjadi konsep ideologi negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, dan terbentuknya Pancasila merupakan suatu proses yang sangat lama dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila juga merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia yang telah menempuh beberapa periode yang dimulai dari periode orde lama hingga saat ini yang berarti setiap peraturan dan perundang-undangan negara pasti berpedoman pada nilai pancasila (Senja Tiarylla et al., 2023). Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan menentang dengan Pancasila, karena isi dari Pancasila tidak bisa di ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila merupakan hasil dari kontrak sosial sehingga akan terus berlaku jika bangsa Indonesia itu sendiri masih menyepakatinya secara Bersama-sama

Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar fundamental yang membentuk tatanan kehidupan politik, sosial, dan budaya di Indonesia (Handayani & Dewi, 2021). Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan pengakuan terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta kebebasan warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Hal ini mengharuskan adanya sikap saling menghormati antarumat beragama, menolak pemaksaan keyakinan, serta membangun toleransi dan kerukunan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak asasi setiap individu, serta memperlakukan sesama dengan adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Nilai kemanusiaan menjadi prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengedepankan semangat nasionalisme dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hal ini mencakup upaya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dalam

keberagaman serta berpartisipasi aktif dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjunjung tinggi asas demokrasi dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini mendorong partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan yang terpercaya dan mengharuskan penghormatan terhadap hasil keputusan bersama. Terakhir, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan serta keadilan di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nilai ini menekankan kesejahteraan tanpa diskriminasi, gotong royong, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap individu. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, diharapkan tercipta masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Pancasila sebagai landasan ilmu

Pancasila adalah landasan fundamental yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun nilai-nilainya telah ada dan berkembang sejak lama, Pancasila baru secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 17 Agustus 1945, bersamaan dengan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil refleksi mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang kemudian dirumuskan untuk menjadi dasar filosofis bangsa.

Secara intrinsik, Pancasila memiliki sifat yang sangat mendalam dan filosofis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat fundamental, universal, dan tidak lekang oleh waktu (Unggul et al., 2020). Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki struktur nilai yang sistematis, di mana setiap sila saling berkaitan, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan. Sifat sistematis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan utuh yang koheren dan berfungsi sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, sifat rasional dari Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan tidak hanya bersumber dari tradisi dan budaya lokal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip universal yang diakui secara global. Dengan sifat intrinsik ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan politik, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika yang memandu kehidupan masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tujuan dan pentingnya pemilu di Indonesia

Menurut (Mulyadi et al., 2023), pemilu di Indonesia memiliki tujuan dan peran yang sangat mendasar dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Melalui pemilu, setiap warga negara dapat mengekspresikan hak politiknya dengan memberikan suara, sehingga mereka turut serta menentukan arah

kebijakan publik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Proses ini menciptakan lingkungan yang menghargai dan melindungi hak-hak individu. Selain itu, pemilu juga menjunjung harkat dan martabat manusia, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama. Kesetaraan ini memperkuat rasa saling menghargai dan menempatkan seluruh warga negara sebagai bagian integral dari negara.

Pemilu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam dialog politik, seperti bertanya, menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan sanggahan terhadap program yang ditawarkan oleh calon pemimpin (Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, 2017). Kebebasan berpendapat ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Selain itu, pemilu mengedepankan sikap saling menghargai dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Pemilu yang berjalan secara damai menunjukkan bahwa masyarakat mampu menerima perbedaan pendapat dan pilihan politik, yang pada akhirnya memperkuat persatuan dan menciptakan iklim politik yang kondusif bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, menghormati HAM, dan membangun masyarakat yang inklusif serta toleran.

Prinsip pemilu sesuai Pancasila

Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dasar. Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa, pemilu dijalankan dengan menghormati nilai-nilai agama dan moral, yang tercermin melalui prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap tahapan pemilu. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menjunjung hak asasi manusia, di mana setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Kebebasan ini memastikan pemilu berjalan dengan adil dan beradab.

Dalam konteks Persatuan Indonesia, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk menjaga harmoni dan toleransi selama proses pemilu berlangsung. Dengan menjaga persatuan, potensi konflik akibat perbedaan pilihan politik dapat diminimalisir. Selanjutnya, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menggarisbawahi bahwa keputusan dalam pemilu diambil melalui mekanisme yang adil, transparan, dan berdasarkan musyawarah. Pemilu juga memastikan keterwakilan semua kelompok masyarakat, tanpa membedakan status sosial, agama, suku, atau gender (Asmawi et al., 2024). Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi proses politik semata, melainkan juga wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi.

Tata Cara & Tahapan Pemilu

Tata cara dan tahapan pemilu di Indonesia diatur secara sistematis untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparan, adil, dan demokratis (Kristian Sumual et al., 2023). Tahapan pertama adalah perencanaan program dan anggaran, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pihak terkait menyusun rencana kegiatan pemilu dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan seluruh proses pemilu. Selanjutnya, pemutakhiran data

pemilih dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak pilih, melalui pencocokan dan penelitian data untuk menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah itu, partai politik dan calon independen mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, dan KPU melakukan verifikasi untuk memastikan persyaratan administrasi dan faktual terpenuhi. Setelah verifikasi selesai, KPU menetapkan peserta pemilu yang memenuhi syarat. Pada tahapan berikutnya, KPU juga menetapkan jumlah kursi legislatif yang diperebutkan dan membagi wilayah menjadi daerah pemilihan (Dapil) berdasarkan jumlah penduduk dan peraturan yang berlaku.

Tahapan selanjutnya adalah pencalonan, di mana partai politik dan calon independen mengajukan nama-nama calon yang akan bertarung dalam pemilu. Proses ini mencakup pendaftaran, verifikasi, serta penetapan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT). Masa kampanye kemudian dimulai, di mana peserta pemilu menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah pelanggaran. Setelah masa kampanye, masa tenang berlangsung beberapa hari sebelum pemungutan suara, di mana kegiatan kampanye dilarang untuk memberikan waktu bagi pemilih merenungkan pilihannya.

Pemungutan suara dilakukan serentak di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan warga yang memiliki hak pilih datang ke TPS untuk memberikan suara mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS, dan hasilnya direkapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. KPU kemudian menetapkan hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi suara yang telah dilakukan, termasuk penetapan pemenang pemilu dan alokasi kursi untuk legislatif. Akhirnya, para pejabat terpilih mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan jabatan yang mereka emban sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Dengan tahapan-tahapan tersebut, pemilu di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Hambatan dalam pemilu berdasarkan pancasila

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Patricia & Yapin, 2019). Hambatan yang berkaitan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa antara lain adalah politik identitas yang memanfaatkan isu agama dan SARA untuk kepentingan politik, kampanye intoleransi yang merusak kerukunan antarumat beragama, serta radikalisasi politik yang memaksakan ideologi tertentu ke dalam proses pemilu. Semua ini dapat memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan bangsa.

Terkait sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, hambatan yang sering terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berupa intimidasi dan ancaman terhadap pemilih, ketidaksetaraan akses bagi masyarakat di daerah terpencil, serta rendahnya pendidikan politik yang membuat pemilih mudah terpengaruh oleh praktik tidak etis seperti politik uang dan penyebaran hoaks.

Dalam konteks sila Persatuan Indonesia, hambatan seperti polarisasi politik akibat perbedaan pilihan yang tajam dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, praktik politik uang dan kecurangan pemilu merusak integritas pemilu serta kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Hambatan yang berkaitan dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan meliputi keterbatasan partisipasi rakyat dalam proses pemilu, dominasi kekuasaan politik oleh kelompok tertentu, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan proses pemilu tidak berjalan secara adil dan transparan.

Sementara itu, hambatan yang berkaitan dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencakup ketimpangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara setara. Selain itu, korupsi politik dan manipulasi data pemilih juga menghambat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga menciptakan demokrasi yang jujur, adil, dan inklusif.

Tantangan dalam Pemilu Berdasarkan Pancasila

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, setiap sila dalam Pancasila memberikan kerangka nilai yang harus dijaga agar proses demokrasi dapat berjalan secara adil dan berintegritas (Prayogo, 2022). Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi agar pemilu tetap mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Pertama, tantangan dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah menjaga netralitas agama dalam politik. Penggunaan isu-isu agama untuk kepentingan politik seringkali memicu perpecahan dan konflik antarumat beragama. Penyelesaian tantangan ini membutuhkan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pemilu tidak terkontaminasi oleh kepentingan agama tertentu dan tetap menghormati kebebasan beragama, serta mencegah kampanye intoleransi dan radikalisme politik. Kedua, dalam konteks sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman politik membuat pemilih rentan terhadap praktik intimidasi, politik uang, dan penyebaran informasi palsu. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat membuat pilihan yang berdasarkan informasi yang benar dan tanpa tekanan, serta menjamin kebebasan dan hak memilih bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya, sila Persatuan Indonesia menghadapi tantangan besar berupa polarisasi politik yang memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan pilihan dan pandangan politik. Proses pemilu yang sehat harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga harmoni di tengah keberagaman bangsa. Oleh karena itu, transparansi dan integritas dalam setiap tahapan pemilu perlu dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pemilu tetap utuh. Upaya untuk mengatasi praktik politik uang dan kecurangan pemilu juga diperlukan agar persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Dalam pelaksanaan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tantangan utamanya adalah memastikan sistem perwakilan yang seimbang dan inklusif. Dominasi kelompok atau partai tertentu dalam

proses pengambilan keputusan dapat menghambat aspirasi rakyat yang lebih luas. Oleh karena itu, proses pemilu harus memberikan ruang bagi musyawarah dan mufakat, sehingga seluruh kepentingan masyarakat dapat terakomodasi, sementara partisipasi aktif warga negara dalam pemilu menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus.

Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Masyarakat yang kurang mampu atau berada di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap informasi dan fasilitas pemilu. Selain itu, korupsi politik dan manipulasi data pemilih dapat merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat agar pemilu dapat dijalankan dengan prinsip keadilan sosial. Mengatasi tantangan-tantangan ini menjadi kunci untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Pancasila dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis dan moral dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap sila dalam Pancasila menawarkan prinsip-prinsip penting, seperti kejujuran, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, yang harus dijunjung tinggi di setiap tahapan pemilu.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang menghalangi terwujudnya pemilu yang ideal. Tantangan-tantangan ini meliputi munculnya politik identitas, pelanggaran hak asasi manusia, polarisasi politik yang semakin tajam, dominasi kekuasaan yang tidak seimbang, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada di masyarakat. Setiap tantangan ini memerlukan langkah nyata untuk mengatasi masalah terkait netralitas agama dalam politik, meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat, menjaga persatuan bangsa, memastikan sistem perwakilan yang inklusif, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan memastikan pemilu yang berintegritas, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Untuk mewujudkan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, ada beberapa saran yang dapat diimplementasikan guna memperbaiki dan memperkuat sistem pemilu di Indonesia. Pertama, peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu akan mampu membuat keputusan yang lebih cerdas, menghindari praktik-praktik negatif seperti politik uang, dan tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi palsu yang dapat merusak proses demokrasi.

Kedua, menjaga netralitas dan integritas penyelenggara pemilu menjadi aspek yang sangat penting. Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh transparansi dan kejujuran. Hal ini akan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu akan semakin kuat jika transparansi dan integritas dalam penyelenggaraannya terjaga dengan baik.

Selanjutnya, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Pemilu yang inklusif akan tercapai jika pemerintah dan lembaga terkait menciptakan berbagai program yang dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pemilu, baik melalui sosialisasi yang efektif maupun dengan memberikan fasilitas yang memadai untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau tinggal di daerah terpencil.

Kemudian, memperkuat penegakan hukum dalam pemilu juga menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi, seperti politik uang, manipulasi suara, dan kecurangan lainnya. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga menjaga integritas pemilu, sehingga proses pemilu tetap berjalan adil dan bersih.

Terakhir, untuk memastikan keadilan sosial dalam pemilu, pemerintah harus fokus pada pemenuhan hak akses informasi dan fasilitas pemilu bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan kondisi sosial-ekonomi yang kurang. Dengan memastikan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat, pemilu dapat berjalan lebih adil dan merata, mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia, serta menciptakan demokrasi yang lebih sehat.

Daftar Pustaka

- Asmawi, M., Sandra Devi, L., & Amiludin. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 4(1), 46–57. <https://doi.org/10.30656/jika.v4i1.8895>
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Kolang, Fabilio Emiliano., Pondaag, Audi H., Londa, J. E. (2017). Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Administratum*, 1–18.
- Kristian Sumual, A., Gerson Lontaan, M., & Supit, Y. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(Mei), 103–112.
- Mulyadi, W., Palilingan, T. N., & Pondaag, A. H. (2023). Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12(3), 5.
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia*

Hukum, 8(2), 155–172. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>

Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>

Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. *Ingenious Knowledge*, 2(4), 277–283.

Unggul, A., Ajati, D., Saputra, R., & Fitriono, R. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, 1(Pancasila), 1–12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>